



SIGn Jurnal Hukum

E-ISSN: 2685 – 8606 || P-ISSN: 2685 – 8614

<https://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/view/v5n2-4>

Volume 5 Issue 2: October 2023 – March 2024

Published Online: December 6, 2023

Article

The Father's Responsibility for the Fulfillment of Child Support Post-Divorce

Tanggung Jawab Ayah terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian

M. Adnan Lira

Universitas Muslim Indonesia || m.adnanlira@umi.ac.id

How to cite:

Lira, M. A. (2023). The Father's Responsibility for the Fulfillment of Child Support Post-Divorce. *SIGn Jurnal Hukum*, 5(2), 276-291. <https://doi.org/10.37276/sjh.v5i2.291>



This work is licensed under a CC BY-4.0 License

ABSTRACT

This study aims to understand responsibility and identify factors influencing a father's inability to provide child support post-divorce. This study uses a normative legal research method. The collected legal material is then qualitatively analyzed to describe the problem and answer the study objectives. The results show that the primary responsibility for child support and education costs post-divorce lies with the father. The father's failure to fulfill this responsibility results in serious consequences, both legally and socially. Factors influencing a father's inability or failure include deteriorating economic conditions post-divorce, limited communication between father and child, and situations where the mother is financially more stable and takes over the role of providing child support. Therefore, it is recommended that relevant stakeholders develop policies and programs that support fathers post-divorce in meeting their responsibilities for child support and children's educational expenses. It is vital to provide fathers access to economic resources, training, and legal assistance to help them overcome financial difficulties post-divorce. Additionally, there should be facilitation of more effective communication between father and child, involving counseling or family mediation. In situations where the mother has better financial stability, stakeholders should consider a balance in the division of child support responsibilities, enabling both parents to contribute according to their capabilities. This approach will help minimize negative impacts on the child and acknowledge the changing socio-economic dynamics post-divorce.

Keyword: Child Support; Family Law; Father's Responsibility; Post-Divorce.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami tanggung jawab serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakmampuan seorang ayah dalam memberikan nafkah anak pasca perceraian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendeskripsikan masalah dan menjawab tujuan kajian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab utama nafkah anak dan biaya pendidikan pasca perceraian ada pada ayah. Kegagalan ayah untuk memenuhi tanggung jawab ini mengakibatkan konsekuensi yang serius, baik secara hukum maupun sosial. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakmampuan atau kegagalan seorang ayah antara lain memburuknya kondisi ekonomi pasca perceraian, terbatasnya komunikasi antara ayah dan anak, dan situasi di mana ibu lebih stabil secara finansial dan mengambil alih peran memberikan nafkah anak. Oleh karena itu, direkomendasikan agar pemangku kepentingan terkait mengembangkan kebijakan dan program yang mendukung ayah pasca perceraian dalam memenuhi tanggung jawab mereka atas nafkah anak dan biaya pendidikan anak. Memberikan akses terhadap sumber daya ekonomi, pelatihan, dan bantuan hukum kepada para ayah sangatlah penting untuk membantu mereka mengatasi kesulitan keuangan pasca perceraian. Selain itu, harus ada fasilitasi komunikasi yang lebih efektif antara ayah dan anak, yang melibatkan konseling atau mediasi keluarga. Dalam situasi dimana ibu memiliki stabilitas keuangan yang lebih baik, pemangku kepentingan harus mempertimbangkan keseimbangan dalam pembagian tanggung jawab nafkah anak, sehingga memungkinkan kedua orang tua untuk berkontribusi sesuai dengan kemampuan mereka. Pendekatan ini akan membantu meminimalkan dampak negatif terhadap anak dan memahami perubahan dinamika sosio-ekonomi pasca perceraian.

Kata Kunci: Hukum Keluarga; Nafkah Anak; Pasca Perceraian; Tanggung Jawab Ayah.

INTRODUCTION

In a general view, marriage is defined as a legal bond between a man and a woman aiming to establish a peaceful, loving, and compassionate family (Hudafi, 2020). However, in Islamic Law, marriage is not merely a tradition or social norm but also an obligation to fulfill human natural needs (Jatmiko et al., 2022). The relationship between a man and a woman in marriage is interpreted as a means to satisfy these natural human instincts in accordance with Islamic teachings. Fulfilling these natural demands through marriage in Islam is seen as a way to achieve a harmonious and happy family life in line with the teachings of Allah and His Apostle. This relationship forms the foundation

PENDAHULUAN

Secara umum, perkawinan diartikan sebagai ikatan sah antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Namun dalam Hukum Islam, perkawinan bukan sekedar tradisi atau norma sosial tetapi juga merupakan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan kodrati manusia. Hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam perkawinan dimaknai sebagai sarana untuk memuaskan naluri alamiah manusia tersebut sesuai dengan ajaran Islam. Memenuhi tuntutan kodrat tersebut melalui pernikahan dalam Islam dipandang sebagai salah satu cara untuk mencapai kehidupan keluarga yang harmonis dan bahagia sejalan dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Hubungan ini menjadi landasan untuk membangun keluarga yang

for building a strong and affectionate family, which subsequently positively impacts society as a whole.

On the other hand, there is the concept of divorce in marital relationships. In religion, divorce is defined as *'talak'*, which means the dissolution of the marriage bond or the end of the marital relationship (Novitasari et al., 2019). The term *'talak'* implies the untying of bonds or the annulment of an agreement, while *'furqah'* means divorce and is the opposite of union (Tsani & Utama, 2022). Divorce marks the end of a husband and wife relationship and is viewed as an allowable act in Islam under certain conditions and terms (Putri, 2021). Divorce in the Religious Courts of Indonesia is regulated by Law Number 7 of 1989¹, which governs divorce that can occur at the husband's initiative (*cerai talak*) or upon the wife's request (*cerai gugat*).

In Civil Law, divorce represents the annulment of marriage through a judicial decision or the demand of one of the parties in the marriage (Mubarak et al., 2016). Divorce in the context of Civil Law can have significant consequences for both the husband and the wife. Moreover, divorce also significantly impacts the rights and duties of children. In this context, children have the right to education, affection, and protection from both parents. However, divorce can affect the fulfillment of these rights, where a child might lose the opportunity to receive love and guidance from one parent (Miralles et al., 2023). Additionally, children can also be adversely affected by conflicts between parents.

After a divorce, parents are responsible for educating and supporting their children. This responsibility does not cease even if the parents are divorced. Education and support are two critical aspects of a child's growth and development. Parents must adequately provide both to ensure their child's proper growth and development.

The responsibility of parents for the fulfillment of child support post-divorce is regulated in Law Number 1 of 1974². Additionally, Islamic Law also asserts the parents' responsibility to nurture and educate their children post-divorce. The parents must fulfill these rights and obligations as a form of their responsibility towards their children.

Regardless of the parent's divorce, Article 28B section (2) of the 1945 Constitution regulates that:

"Every child has the right to live, to grow and to develop, and has the right to protection from violence and discrimination."

kokoh dan penuh kasih sayang, yang selanjutnya berdampak positif pada masyarakat secara keseluruhan.

Di sisi lain, terdapat konsep perceraian dalam hubungan perkawinan. Dalam agama, perceraian diartikan dengan *'talak'* yang berarti putusannya ikatan perkawinan atau berakhirnya hubungan perkawinan. Istilah *'talak'* mengandung arti lepasnya ikatan atau batalnya suatu perjanjian, sedangkan *'furqah'* berarti perceraian dan merupakan lawan kata dari berkumpul. Perceraian menandai berakhirnya hubungan suami istri dan dipandang sebagai tindakan yang diperbolehkan dalam Islam dengan syarat dan ketentuan tertentu. Perceraian di Pengadilan Agama Indonesia diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1989¹, yang mengatur tentang perceraian yang dapat terjadi atas inisiatif suami (*cerai talak*) atau atas permintaan istri (*cerai gugat*).

Dalam Hukum Perdata, perceraian merupakan pembatalan perkawinan melalui putusan pengadilan atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. Perceraian dalam konteks Hukum Perdata dapat menimbulkan akibat yang besar baik bagi suami maupun istri. Selain itu, perceraian juga berdampak signifikan terhadap hak dan kewajiban anak. Dalam konteks ini, anak mempunyai hak atas pendidikan, kasih sayang, dan perlindungan dari kedua orang tuanya. Namun perceraian dapat mempengaruhi pemenuhan hak-hak tersebut, dimana seorang anak dapat kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kasih sayang dan bimbingan dari salah satu orang tuanya. Selain itu, anak juga dapat terkena dampak buruk dari konflik antar orang tua.

Setelah perceraian, orang tua bertanggung jawab untuk mendidik dan menafkahi anak-anaknya. Tanggung jawab ini tidak berhenti meskipun orang tuanya bercerai. Pendidikan dan dukungan adalah dua aspek penting dari pertumbuhan dan perkembangan anak. Orang tua harus menyediakan keduanya secara memadai untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak mereka dengan baik.

Tanggung jawab orang tua terhadap pemenuhan nafkah anak pasca perceraian diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974². Selain itu, Hukum Islam juga menegaskan tanggung jawab orang tua dalam mengasuh dan mendidik anaknya pasca perceraian. Hak dan kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh orang tua sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap anak.

Terlepas dari perceraian orang tua, Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa:

"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

¹Law Number 7 of 1989 has been amended more than once (Law Number 3 of 2006 for the first amendment; Law Number 50 of 2009 for the second amendment).

²Law Number 1 of 1974 has been amended by Law Number 16 of 2019.

¹UU Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah lebih dari satu kali (UU Nomor 3 Tahun 2006 untuk perubahan pertama; UU Nomor 50 Tahun 2009 untuk perubahan kedua).

²UU Nomor 1 Tahun 1974 telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019.

The provision above reaffirms the state's commitment to protecting children as the nation's future generation. The protection of children's rights is also regulated at the international level. Several international instruments have been ratified by the Indonesian government and adopted into national legislation. The Convention on the Rights of the Child (CRC) is an example of an international regulation ratified by Indonesia (Adebayo, 2020). The CRC is a convention that protects children's rights, and Indonesia, as a signatory, is obligated to implement its provisions (Darmi, 2016).

The ratification of the CRC demonstrates Indonesia's commitment to protecting these rights. This ratification signifies the government's seriousness in upholding children's rights and providing them with maximum protection (Mahmud et al., 2019). With this ratification, Indonesia has a legal responsibility to ensure that the rights of children within its territory are fulfilled and safeguarded.

Based on the discussion above, this study aims to understand a father's responsibility for child support post-divorce. Additionally, the study seeks to identify factors influencing a father's inability to provide child support post-divorce. The anticipated benefit of this study is to offer deeper insights into the dynamics involved in fulfilling a father's financial responsibilities post-divorce. This information could be valuable for policymakers in optimizing regulations related to child support obligations, as well as for legal practitioners handling similar cases.

METHOD

This study uses a normative legal research method (Qamar & Rezah, 2020). The legal materials used in this study include legislation, legal books, scholarly articles, and online materials that discuss the father's responsibility for the fulfillment of child support post-divorce. The collection of these legal materials is done through a literature study technique. The collected legal material is then qualitatively analyzed to describe the problem and answer the study objectives (Sampara & Husen, 2016).

RESULTS AND DISCUSSION

The Father's Responsibility for the Fulfillment of Child Support Post-Divorce

Understanding the concepts of 'liability' and 'responsibility' in family law is crucial for a deeper comprehension of a father's responsibility for the fulfillment of child support post-divorce. 'Liability,' in a legal context, often relates to a legal obligation enforceable through legal processes. This aspect

Ketentuan di atas menegaskan kembali komitmen negara dalam melindungi anak sebagai generasi penerus bangsa. Perlindungan hak-hak anak juga diatur di tingkat internasional. Beberapa instrumen internasional telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dan diadopsi menjadi peraturan perundang-undangan nasional. Konvensi Hak Anak (CRC) merupakan salah satu contoh peraturan internasional yang diratifikasi oleh Indonesia. CRC merupakan konvensi yang melindungi hak-hak anak, dan Indonesia sebagai salah satu negara penandatanganan wajib melaksanakan ketentuan-ketentuannya.

Ratifikasi CRC menunjukkan komitmen Indonesia dalam melindungi hak-hak tersebut. Ratifikasi ini menandakan keseriusan pemerintah dalam menegakkan hak-hak anak dan memberikan perlindungan maksimal kepada mereka. Dengan ratifikasi ini, Indonesia mempunyai tanggung jawab hukum untuk memastikan hak-hak anak di wilayahnya terpenuhi dan terlindungi.

Berdasarkan pembahasan di atas, penelitian ini bertujuan untuk memahami tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak pasca perceraian. Selain itu, penelitian ini berupaya mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakmampuan seorang ayah dalam memberikan nafkah anak pasca perceraian. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai dinamika yang terlibat dalam pemenuhan tanggung jawab keuangan ayah pasca-perceraian. Informasi ini dapat bermanfaat bagi pembuat kebijakan dalam mengoptimalkan peraturan terkait kewajiban nafkah anak, serta bagi praktisi hukum yang menangani kasus serupa.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan, buku hukum dan artikel ilmiah, serta materi online yang membahas tentang tanggung jawab ayah terhadap pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. Pengumpulan bahan-bahan hukum tersebut dilakukan melalui teknik studi pustaka. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendeskripsikan masalah dan menjawab tujuan kajian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Ayah terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian

Pemahaman terhadap konsep 'liability' dan 'responsibility' dalam hukum keluarga sangat penting untuk memahami lebih dalam mengenai tanggung jawab ayah terhadap pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. 'Liability', dalam konteks hukum, sering kali berkaitan dengan kewajiban hukum yang dapat dilaksanakan melalui proses hukum. Aspek ini berkaitan dengan

pertains to legal claims that can be made against individuals who fail to meet their legal obligations. On the other hand, 'responsibility' refers to an individual's moral or ethical duty. In the family context, this often involves a father's social and moral responsibility to provide financial and emotional support to his children (Trisna et al., 2022).

In legal practice, especially in divorce cases, these two concepts often intersect and overlap. For example, a father has a legal 'liability' for the fulfillment of child support post-divorce. Legally, he is required to meet this financial obligation. Failure to fulfill this obligation can result in legal consequences, such as lawsuits or other law enforcement actions (Gussevi et al., 2023). Conversely, a father's 'responsibility' extends beyond financial obligations, encompassing a moral duty to support the welfare and development of his children, even after the marital relationship with his partner has ended.

Following the understanding of 'liability' and 'responsibility' in family law, it is vital to explore a father's responsibility for the fulfillment of child support post-divorce further. In many legal systems, including family law, the responsibility for child support does not end with the dissolution of the marriage. This duty affirmed in numerous legislations, recognizes the importance of financial support for a child's growth and development (Nurfieni, 2022). In this regard, Article 41 point b of Law Number 1 of 1974 regulates that:

"The consequence of the dissolution of marriage due to divorce is that the father is responsible for all costs of maintenance and education necessary for the child; if the father in reality cannot fulfill this obligation, the Court may determine that the mother also bears some of these costs."

The provision above explicitly establishes that the father has the primary responsibility for the maintenance and educational expenses of the child post-divorce. In this case, the father is responsible not only for basic needs like food, clothing, and shelter but also for educational and developmental needs, including school fees and extracurricular activities. A crucial aspect of this provision is the recognition that the child's needs remain a top priority, even though the marital relationship between the parents has ended. The provision reflects a legal commitment to protecting child welfare, considered a crucial aspect of family law.

Article 41 point b of Law Number 1 of 1974 also provides a framework for resolving issues related to the fulfillment of child support in legal practice.

tuntutan hukum yang dapat diajukan terhadap orang perseorangan yang tidak dapat memenuhi kewajiban hukumnya. Di sisi lain, 'responsibility' mengacu pada kewajiban moral atau etika individu. Dalam konteks keluarga, hal ini sering kali melibatkan tanggung jawab sosial dan moral seorang ayah untuk memberikan dukungan finansial dan emosional kepada anak-anaknya.

Dalam praktik hukum, khususnya dalam kasus perceraian, kedua konsep ini seringkali bersinggungan dan tumpang tindih. Misalnya, seorang ayah mempunyai 'liability' hukum atas pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. Secara hukum, dia diharuskan memenuhi kewajiban finansial ini. Kegagalan untuk memenuhi kewajiban ini dapat menimbulkan akibat hukum, seperti tuntutan hukum atau tindakan penegakan hukum lainnya. Sebaliknya, 'responsibility' seorang ayah lebih dari sekedar kewajiban finansial, mencakup kewajiban moral untuk mendukung kesejahteraan dan perkembangan anak-anaknya, bahkan setelah hubungan perkawinan dengan pasangannya berakhir.

Mengikuti pemahaman mengenai 'liability' dan 'responsibility' dalam hukum keluarga, maka penting untuk menggali lebih jauh tanggung jawab ayah terhadap pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. Dalam banyak sistem hukum, termasuk hukum keluarga, tanggung jawab nafkah anak tidak berakhir dengan putusannya perkawinan. Kewajiban ini ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yang mengakui pentingnya dukungan finansial bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Sehubungan dengan itu, Pasal 41 huruf b UU Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa:

"Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut."

Ketentuan di atas secara tegas menyatakan bahwa ayahlah yang mempunyai tanggung jawab utama atas nafkah dan biaya pendidikan anak pasca perceraian. Dalam hal ini, ayah bertanggung jawab tidak hanya terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan, namun juga kebutuhan pendidikan dan perkembangan, termasuk biaya sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler. Aspek krusial dari ketentuan ini adalah adanya pengakuan bahwa kebutuhan anak tetap menjadi prioritas utama, meskipun hubungan perkawinan antara orang tuanya telah berakhir. Ketentuan ini mencerminkan komitmen hukum untuk melindungi kesejahteraan anak, yang dianggap sebagai aspek penting dalam hukum keluarga.

Pasal 41 huruf b UU Nomor 1 Tahun 1974 juga memberikan kerangka penyelesaian permasalahan terkait pemenuhan nafkah anak dalam praktik hukum. Ketika perkara perceraian dibawa ke Pengadilan,

When a divorce case is brought to Court, the judge is responsible for determining the amount of support to be provided to the children based on their needs and the financial capabilities of the parents. In setting child support, religious courts follow procedures regulated in [Law Number 7 of 1989](#).

A husband may file a request for the fulfillment of child support, as based on Article 66 section (5) of [Law Number 7 of 1989](#), which regulates that:

“A request regarding child custody, child support, wife alimony, and marital property can be filed together with the application for divorce or after the pronouncement of divorce.”

Conversely, a wife may file a request concerning the father’s responsibility for the fulfillment of child support, as based on Article 78 point b of [Law Number 7 of 1989](#), which regulates that:

“During the ongoing divorce litigation, upon the plaintiff’s request, the Court may determine necessary matters to ensure the maintenance and education of the child.”

The judge in the Religious Court then conducts a series of examinations and evaluations to determine a fair amount of child support. Factors considered in this process include the child’s basic needs, such as education, health, and daily requirements, as well as the financial ability of the father as the provider of child support. The judge also considers other factors like the child’s age, cost of living in the area where the child resides, and the standard of living the child received during the marriage ([Khairuddin et al., 2020](#)).

Moreover, the judge strives to ensure that the process of setting child support is fair and transparent. This process includes providing opportunities for both parties to present their arguments and evidence. Judges in religious courts are responsible for ensuring that all considerations are made carefully and in accordance with legal principles. In this context, religious courts not only function as legal institutions but also as entities ensuring social justice, particularly in protecting the rights of children post-divorce ([Rahman et al., 2020](#)). This approach reflects the courts’ effort to balance legal protection for children and parental obligations post-divorce.

A father’s failure to be responsible for the fulfillment of child support post-divorce carries serious consequences, both legally and socially. Legally, this failure can be seen as a violation of court orders and applicable legal regulations. This situation can result in various legal actions against the father, ranging from enforcement in the form of fines or other sanctions to further legal measures that can affect his rights as a

hakim bertanggung jawab untuk menentukan besarnya nafkah yang akan diberikan kepada anak berdasarkan kebutuhan dan kemampuan keuangan orang tuanya. Dalam menetapkan nafkah anak, pengadilan agama mengikuti prosedur yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1989.

Seorang suami dapat mengajukan permohonan pemenuhan nafkah anak, berdasarkan Pasal 66 ayat (5) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang mengatur bahwa:

“Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.”

Sebaliknya, istri dapat mengajukan permohonan mengenai tanggung jawab ayah atas pemenuhan nafkah anak, berdasarkan Pasal 78 huruf b UU Nomor 7 Tahun 1989 yang mengatur bahwa:

“Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat, Pengadilan dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak.”

Hakim di Pengadilan Agama kemudian melakukan serangkaian pemeriksaan dan evaluasi untuk menentukan besarnya nafkah anak yang wajar. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam proses ini meliputi kebutuhan dasar anak, seperti pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari, serta kemampuan finansial ayah sebagai pemberi nafkah anak. Hakim juga mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti usia anak, biaya hidup di daerah tempat tinggal anak, dan taraf hidup yang diterima anak selama perkawinan.

Selain itu, hakim berupaya memastikan bahwa proses penetapan nafkah anak berlangsung adil dan transparan. Proses ini termasuk memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk menyampaikan argumen dan buktinya. Hakim pada pengadilan agama bertanggung jawab untuk memastikan bahwa segala pertimbangan dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan asas hukum. Dalam konteks ini, pengadilan agama tidak hanya berfungsi sebagai lembaga hukum tetapi juga sebagai lembaga yang menjamin keadilan sosial, khususnya dalam melindungi hak-hak anak pasca perceraian. Pendekatan ini mencerminkan upaya pengadilan untuk menyeimbangkan perlindungan hukum bagi anak dan kewajiban orang tua pasca perceraian.

Kegagalan seorang ayah dalam bertanggung jawab terhadap pemenuhan nafkah anak pasca perceraian membawa akibat yang serius, baik secara hukum maupun sosial. Secara hukum, kegagalan ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap perintah pengadilan dan peraturan hukum yang berlaku. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan berbagai tindakan hukum terhadap sang ayah, mulai dari penegakan hukum berupa denda atau sanksi lainnya hingga tindakan hukum lebih lanjut yang dapat mempengaruhi

father. This failure is not only regarded as a violation against an individual or another party but also against the legal system that seeks to protect children's rights.

From a social perspective, a father's failure to be responsible for the fulfillment of child support post-divorce can have profound impacts on the welfare and development of the child. Children who do not receive adequate financial support from their fathers tend to face greater challenges in education, health, and psychosocial aspects. This situation affects not only their current living conditions but can also have long-term implications for the children's future. The inability to meet basic needs or access quality education can hinder children from reaching their full potential.

Furthermore, a father's failure to be responsible for the fulfillment of child support post-divorce also raises questions about principles of justice and equity. In the context of family law, the principle of justice is not only about the father's responsibility for the fulfillment of child support but also about protecting the child's right to receive appropriate and stable support from the father. When one party evades this responsibility, it disrupts these principles of justice, and the legal system faces challenges in ensuring that children's rights remain protected and advocate. This situation highlights the importance of effective and responsive law enforcement to children's needs in the context of post-divorce family problems.

Factors Causing Fathers' Inability to Responsible for the Fulfillment of Child Support Post-Divorce

In the context of divorce, several factors play a role in a father's inability or failure to be responsible for the fulfillment of child support. *First*, the father's often disrupted or diminished economic condition post-divorce serves as a primary barrier. *Second*, limited communication between the father and child post-divorce frequently results in weakened bonds and reduced support. *Lastly*, situations where the mother is more financially stable and responsible for the fulfillment of child support can also impact the father's role in providing support. All these factors comprehensively affect the father's responsibility for the fulfillment of child support post-divorce.

The Economic Condition of a Father

The economic condition of a father in being responsible for the fulfillment of child support post-divorce is a crucial aspect of family law studies (Darna,

haknya sebagai seorang ayah. Kegagalan ini tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran terhadap individu atau pihak lain, namun juga terhadap sistem hukum yang berupaya melindungi hak-hak anak.

Dari sudut pandang sosial, kegagalan seorang ayah dalam bertanggung jawab terhadap pemenuhan nafkah anak pasca perceraian dapat berdampak besar pada kesejahteraan dan tumbuh kembang anak. Anak-anak yang tidak mendapat dukungan finansial yang memadai dari ayahnya cenderung menghadapi tantangan yang lebih besar dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan psikososial. Situasi ini tidak hanya berdampak pada kondisi kehidupan mereka saat ini namun juga dapat berdampak jangka panjang bagi masa depan anak-anak. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar atau mengakses pendidikan berkualitas dapat menghambat anak mencapai potensi maksimalnya.

Selain itu, kegagalan seorang ayah dalam bertanggung jawab atas pemenuhan nafkah anak pasca perceraian juga menimbulkan pertanyaan mengenai prinsip keadilan dan kesetaraan. Dalam konteks hukum keluarga, asas keadilan bukan hanya mengenai tanggung jawab ayah terhadap pemenuhan nafkah anak, namun juga melindungi hak anak untuk menerima nafkah yang layak dan stabil dari ayah. Ketika salah satu pihak menghindari tanggung jawab ini, hal ini akan mengganggu prinsip-prinsip keadilan, dan sistem hukum menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa hak-hak anak tetap dilindungi dan diadvokasi. Situasi ini menyoroti pentingnya penegakan hukum yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan anak dalam konteks permasalahan keluarga pasca perceraian.

Faktor-Faktor Penyebab Ketidakmampuan Ayah dalam Pemenuhan Tanggung Jawab Nafkah Anak Pasca Perceraian

Dalam konteks perceraian, ada beberapa faktor yang berperan dalam ketidakmampuan atau kegagalan seorang ayah dalam bertanggung jawab atas pemenuhan nafkah anak. *Pertama*, kondisi ekonomi ayah yang sering terganggu atau terpuruk pasca perceraian menjadi penghalang utama. *Kedua*, terbatasnya komunikasi antara ayah dan anak pasca perceraian sering kali mengakibatkan melemahnya ikatan dan berkurangnya dukungan. *Terakhir*, situasi dimana ibu lebih stabil secara finansial dan bertanggung jawab atas pemenuhan nafkah anak juga dapat berdampak pada peran ayah dalam memberikan dukungan. Semua faktor tersebut secara komprehensif mempengaruhi tanggung jawab ayah terhadap pemenuhan nafkah anak pasca perceraian.

Kondisi Ekonomi Ayah

Kondisi ekonomi seorang ayah dalam bertanggung jawab terhadap pemenuhan nafkah anak pasca perceraian merupakan aspek krusial dalam kajian hukum keluarga. Literatur terkait menunjukkan bahwa kondisi ekonomi seorang ayah berdampak langsung

2021). Related literature indicates that a father's economic condition directly impacts his ability to provide child support. This literature includes not only the ability to provide necessities like food, clothing, and shelter but also educational needs and the general welfare of the child. These studies highlight that income reduction or financial instability post-divorce can limit a father's capacity to fulfill child support responsibilities.

In the context of family economic theory, the impact of a father's economic condition on his responsibility for the fulfillment of child support post-divorce can be understood through the lens of resource allocation and expenditure priorities (Becker, 1965). This theory suggests that individuals or families make economic decisions based on available resources and their priorities. For post-divorce fathers, this theory can help explain how reduced financial resources influence decisions regarding the allocation of funds for child support. Difficult economic conditions may force fathers to make tough choices between meeting personal needs and fulfilling obligations to their children.

Furthermore, the literature acknowledges that a post-divorce father's economic condition is influenced not only by income but also by other factors such as debts, living expenses, and other financial responsibilities that may arise from the divorce (Resmini et al., 2021). This literature indicates that responsibility for the fulfillment of child support is not always directly related to income level but also effective financial management and spending priorities. Therefore, a comprehensive understanding of a post-divorce father's economic condition requires a holistic assessment that considers various economic factors and financial decisions faced by fathers in the post-divorce context.

Comparing literature findings with existing legal practices and social policies offers crucial insights into understanding how regulations and policies affect post-divorce fathers' economic conditions and their responsibility for child support fulfillment. In legal practice, especially within family law, regulations are often established to ensure child support fulfillment. This regulation includes clear provisions regarding the amount of child support, its determination, and enforcement mechanisms for non-compliance (Mansari & Moriyanti, 2019). However, these legal practices sometimes do not fully align with the economic realities faced by post-divorce fathers.

In many cases, the law provides a framework to guarantee the fulfillment of child support, but it does not always consider the changing economic conditions experienced by post-divorce fathers. For instance, a

pada kemampuannya dalam memberikan nafkah anak. Literatur ini tidak hanya mencakup kemampuan untuk menyediakan kebutuhan seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal tetapi juga kebutuhan pendidikan dan kesejahteraan anak secara umum. Studi-studi ini menyoroti bahwa penurunan pendapatan atau ketidakstabilan keuangan pasca perceraian dapat membatasi kapasitas seorang ayah untuk memenuhi tanggung jawab nafkah anak.

Dalam konteks teori ekonomi keluarga, dampak kondisi ekonomi ayah terhadap tanggung jawab pemenuhan nafkah anak pasca perceraian dapat dipahami melalui kacamata alokasi sumber daya dan prioritas pengeluaran. Teori ini mengemukakan bahwa individu atau keluarga membuat keputusan ekonomi berdasarkan sumber daya yang tersedia dan prioritasnya. Bagi ayah pasca perceraian, teori ini dapat membantu menjelaskan bagaimana berkurangnya sumber daya keuangan mempengaruhi keputusan mengenai alokasi dana untuk nafkah anak. Kondisi ekonomi yang sulit mungkin memaksa para ayah untuk mengambil pilihan sulit antara memenuhi kebutuhan pribadi dan memenuhi kewajiban terhadap anak-anaknya.

Lebih lanjut, literatur mengakui bahwa kondisi ekonomi ayah pasca perceraian tidak hanya dipengaruhi oleh pendapatan tetapi juga oleh faktor lain seperti hutang, biaya hidup, dan tanggung jawab keuangan lainnya yang mungkin timbul akibat perceraian. Literatur ini menunjukkan bahwa tanggung jawab pemenuhan nafkah anak tidak selalu berhubungan langsung dengan tingkat pendapatan namun juga pengelolaan keuangan dan prioritas pengeluaran yang efektif. Oleh karena itu, pemahaman komprehensif terhadap kondisi ekonomi ayah pasca perceraian memerlukan kajian holistik yang mempertimbangkan berbagai faktor ekonomi dan keputusan keuangan yang dihadapi ayah dalam konteks pasca perceraian.

Membandingkan temuan literatur dengan praktik hukum dan kebijakan sosial yang ada memberikan wawasan penting untuk memahami bagaimana peraturan dan kebijakan mempengaruhi kondisi ekonomi ayah pasca perceraian dan tanggung jawab mereka terhadap pemenuhan nafkah anak. Dalam praktik hukum, khususnya dalam hukum keluarga, seringkali peraturan dibuat untuk menjamin pemenuhan nafkah anak. Peraturan ini memuat ketentuan yang jelas mengenai besaran nafkah anak, penetapannya, dan mekanisme penegakan hukum atas ketidakpatuhan. Namun, praktik hukum ini terkadang tidak sepenuhnya sejalan dengan realitas ekonomi yang dihadapi para ayah pasca perceraian.

Dalam banyak kasus, undang-undang memberikan kerangka untuk menjamin pemenuhan nafkah anak, namun undang-undang tersebut tidak selalu mempertimbangkan perubahan kondisi ekonomi yang dialami para ayah pasca perceraian. Misalnya, penurunan pendapatan atau peningkatan biaya hidup

decrease in income or an increase in living costs can impact a father's ability to fulfill the established child support responsibilities. Here, a misalignment occurs between legal expectations and economic realities, highlighting the need for more flexible and responsive policies to accommodate changes in economic conditions.

Additionally, social policies also play a role in supporting the father's responsibility for post-divorce child support fulfillment. Policies such as social assistance programs, employment support, and counseling services can aid fathers in managing the economic and social challenges faced post-divorce. However, the availability and accessibility of these services can vary, influencing how effectively they bridge the gap between legal obligations and economic capability. Therefore, there is a need for ongoing adjustments to social policies in sync with legal practices to ensure both work effectively and balance in supporting the father's responsibility for child support fulfillment post-divorce.

Communication between Father and Child

In family law, communication between father and child plays a crucial role, especially post-divorce. Legal norms often recognize and affirm the importance of maintaining this communication, not just as a means of social interaction but as an integral part of fulfilling the rights and obligations of fathers and children. In many legal systems, the continuity of father-child communication is considered vital in determining custody arrangements, access rights, and the fulfillment of child support (Ghaisa, 2020). This regulation reflects the understanding that the father-child relationship does not end with divorce but must be maintained and nurtured for the child's best interests.

On the other hand, the law also faces challenges in addressing situations where communication between father and child becomes limited or severed post-divorce. In many instances, legal regulations strive to provide solutions to ensure that this relationship remains intact despite communication barriers. For example, the law may regulate visitation rights or joint custody as a means to maintain father-child communication. However, the law must also be sensitive to dynamics that might impede effective communication, such as parental conflict or psychological issues faced by the child. Therefore, in many cases, legal decisions are not solely based on formal legal principles but also consider psychosocial factors that can affect the father-child relationship.

Furthermore, the role of communication in the context of responsibility for the fulfillment of child

dapat berdampak pada kemampuan ayah untuk memenuhi tanggung jawab nafkah anak yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, terjadi ketidakselarasan antara ekspektasi hukum dan realitas perekonomian, sehingga menyoroti perlunya kebijakan yang lebih fleksibel dan responsif untuk mengakomodasi perubahan kondisi perekonomian.

Selain itu, kebijakan sosial juga berperan dalam mendukung tanggung jawab ayah dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. Kebijakan seperti program bantuan sosial, dukungan pekerjaan, dan layanan konseling dapat membantu para ayah dalam mengelola tantangan ekonomi dan sosial yang dihadapi pasca perceraian. Namun, ketersediaan dan aksesibilitas layanan-layanan ini dapat bervariasi, sehingga mempengaruhi seberapa efektif layanan-layanan tersebut menjembatani kesenjangan antara kewajiban hukum dan kemampuan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian berkelanjutan terhadap kebijakan sosial yang selaras dengan praktik hukum untuk memastikan keduanya berjalan efektif dan seimbang dalam mendukung tanggung jawab ayah dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian.

Komunikasi antara Ayah dan Anak

Dalam hukum keluarga, komunikasi antara ayah dan anak memegang peranan penting, terutama pasca perceraian. Norma hukum seringkali mengakui dan menegaskan pentingnya menjaga komunikasi tersebut, tidak hanya sebagai sarana interaksi sosial tetapi sebagai bagian integral dari pemenuhan hak dan kewajiban ayah dan anak. Di banyak sistem hukum, kesinambungan komunikasi ayah-anak dianggap penting dalam menentukan pengaturan hak asuh, hak akses, dan pemenuhan nafkah anak. Peraturan ini mencerminkan pemahaman bahwa hubungan ayah-anak tidak berakhir dengan perceraian tetapi harus dijaga dan dibina demi kepentingan terbaik anak.

Di sisi lain, undang-undang juga menghadapi tantangan dalam mengatasi situasi di mana komunikasi antara ayah dan anak menjadi terbatas atau terputus pasca perceraian. Dalam banyak kasus, peraturan hukum berupaya memberikan solusi untuk memastikan bahwa hubungan ini tetap utuh meskipun terdapat hambatan komunikasi. Misalnya, undang-undang mungkin mengatur hak kunjungan atau hak asuh bersama sebagai sarana menjaga komunikasi ayah-anak. Namun, undang-undang juga harus peka terhadap dinamika yang mungkin menghambat komunikasi efektif, seperti konflik orang tua atau masalah psikologis yang dihadapi anak. Oleh karena itu, dalam banyak kasus, pengambilan keputusan hukum tidak semata-mata didasarkan pada asas hukum formal tetapi juga mempertimbangkan faktor psikososial yang dapat mempengaruhi hubungan ayah-anak.

Lebih lanjut, peran komunikasi dalam konteks tanggung jawab pemenuhan nafkah anak berbeda antara ayah dan ibu. Undang-undang sering kali

support differs between fathers and mothers. The law often recognizes that effective communication between the child and both parents is key to fulfilling the child's emotional and psychological needs, which are integral parts of support. In cases where the mother is the primary caregiver post-divorce, she is often seen as having a more significant role in facilitating communication between the child and the father (Sihabuddin & Nahuway, 2022). This situation is not only important for maintaining emotional bonds but can also influence the father's ability to understand and meet the child's needs. In this context, the law encourages and sometimes even requires both parents to cooperate in this aspect of communication as part of their responsibility for the fulfillment of child support.

Meanwhile, a lack of communication between father and child post-divorce can significantly impact the responsibility for fulfillment in a legal context. When communication is limited, a father may struggle to understand the specific needs and changes in his children's lives. This situation can lead to gaps in the fulfillment of child support, both materially and emotionally. In legal contexts, the fulfillment of child support is viewed not only financially but also in terms of the child's overall well-being and development. Therefore, when effective communication is not established, questions may arise regarding the extent of a father's responsibility for the comprehensive fulfillment of child support.

Several legal cases have highlighted how limited communication can influence court decisions regarding custody rights and child support. For instance, in cases where a father is not actively communicating or involved in the child's life, the Court may consider this as a factor in determining the father's level of involvement in custody and the amount of child support required. Conversely, the Court may use this lack of communication as a basis to encourage increased interaction between father and child as a means to ensure more effective fulfillment of the child's needs. This situation demonstrates that the law not only recognizes the importance of communication in fulfilling child support but also strives to address communication barriers that may arise post-divorce.

Given the importance of communication in ensuring a father's post-divorce child support responsibilities, several strategic recommendations can be adopted in a legal context to support this communication enhancement. Firstly, the law can provide more flexible and adaptive mechanisms for arranging father's visitation schedules. This recommendation includes considering the specific needs of the child and the father's circumstances, as

mengakui bahwa komunikasi yang efektif antara anak dan kedua orang tuanya adalah kunci untuk memenuhi kebutuhan emosional dan psikologis anak, yang merupakan bagian integral dari dukungan. Dalam kasus di mana ibu merupakan pengasuh utama pasca perceraian, ibu sering dianggap mempunyai peran yang lebih penting dalam memfasilitasi komunikasi antara anak dan ayah. Situasi ini tidak hanya penting untuk menjaga ikatan emosional tetapi juga dapat mempengaruhi kemampuan ayah dalam memahami dan memenuhi kebutuhan anak. Dalam konteks ini, undang-undang mendorong dan bahkan terkadang mengharuskan kedua orang tua untuk bekerja sama dalam aspek komunikasi ini sebagai bagian dari tanggung jawab mereka atas pemenuhan nafkah anak.

Sementara itu, kurangnya komunikasi antara ayah dan anak pasca perceraian dapat berdampak signifikan terhadap tanggung jawab pemenuhannya dalam konteks hukum. Ketika komunikasi terbatas, seorang ayah mungkin kesulitan memahami kebutuhan spesifik dan perubahan dalam kehidupan anak-anaknya. Situasi ini dapat menimbulkan kesenjangan dalam pemenuhan nafkah anak, baik secara materi maupun emosional. Dalam konteks hukum, pemenuhan nafkah anak tidak hanya dilihat dari segi finansial tetapi juga kesejahteraan dan perkembangan anak secara keseluruhan. Oleh karena itu, ketika komunikasi yang efektif tidak terjalin, pertanyaan mungkin timbul mengenai sejauh mana tanggung jawab seorang ayah terhadap pemenuhan nafkah anak secara komprehensif.

Beberapa kasus hukum menyoroti bagaimana komunikasi yang terbatas dapat mempengaruhi keputusan pengadilan mengenai hak asuh dan nafkah anak. Misalnya, dalam kasus di mana seorang ayah tidak berkomunikasi secara aktif atau terlibat dalam kehidupan anak, Pengadilan dapat mempertimbangkan hal ini sebagai faktor dalam menentukan tingkat keterlibatan ayah dalam hak asuh dan jumlah nafkah anak yang diperlukan. Sebaliknya, Pengadilan dapat menggunakan kurangnya komunikasi ini sebagai dasar untuk mendorong peningkatan interaksi antara ayah dan anak sebagai sarana untuk memastikan pemenuhan kebutuhan anak secara lebih efektif. Situasi ini menunjukkan bahwa undang-undang tidak hanya mengakui pentingnya komunikasi dalam memenuhi nafkah anak tetapi juga berupaya mengatasi hambatan komunikasi yang mungkin timbul pasca perceraian.

Mengingat pentingnya komunikasi dalam memastikan tanggung jawab nafkah anak pasca perceraian seorang ayah, beberapa rekomendasi strategis dapat diadopsi dalam konteks hukum untuk mendukung peningkatan komunikasi ini. Pertama, undang-undang dapat memberikan mekanisme yang lebih fleksibel dan adaptif untuk mengatur jadwal kunjungan ayah. Rekomendasi ini mencakup mempertimbangkan kebutuhan khusus anak dan keadaan ayah, serta menyediakan ruang untuk penyesuaian jadwal sebagai respons terhadap

well as providing room for schedule adjustments in response to changing situations. Secondly, the law can encourage the use of mediation or family counseling as part of the divorce process. Through this approach, fathers and children can be assisted in developing more effective communication methods, thus reducing the risk of relationship breakdown post-divorce.

Additionally, the law can integrate education or training programs for post-divorce parents aimed at improving their communication skills. Such programs can be highly beneficial in helping fathers understand how to communicate with their children in the new context post-divorce. The legal implications of improved communication include the potential for better fulfillment of child support responsibilities. With better communication, fathers are more likely to understand their children's needs and be responsive to changes in their lives. This situation not only strengthens the father-child relationship but also ensures that child support responsibilities are fulfilled more effectively and in accordance with the child's needs.

More Established Economic Condition of the Mother

In the context of family law, the more established economic role of the mother post-divorce receives special consideration, especially regarding the responsibility for the fulfillment of child support. Current family law regulations acknowledge the importance of contributions from both parents in meeting the child's needs without distinguishing roles based on gender (Ainiyah & Muslih, 2020). This regulation reflects a paradigm shift where the mother's economic contribution is no longer considered secondary.

Furthermore, existing legal doctrines have adapted to the understanding that the responsibility for the fulfillment of child support is not exclusive to the father. In this context, the more established economic role of the mother becomes a crucial factor in determining the amount or proportion of child support each parent must fulfill. This situation marks a shift from the traditional view that tends to burden the father with full financial responsibility.

On the other hand, the legal interpretation of the division of responsibility for the fulfillment of child support between fathers and mothers gains relevance in cases where fathers face challenges in fulfilling their obligations. When a father encounters financial difficulties, courts often face the task of reassessing the distribution of child support responsibility. In this process, the Court considers various factors, including the mother's income and economic condition. If the mother has a more established economic capability, the law might assign her greater responsibility for child support, reflecting principles of fairness and balance.

perubahan situasi. Kedua, undang-undang dapat mendorong penggunaan mediasi atau konseling keluarga sebagai bagian dari proses perceraian. Melalui pendekatan ini, ayah dan anak dapat dibantu dalam mengembangkan metode komunikasi yang lebih efektif, sehingga mengurangi risiko putusnya hubungan pasca perceraian.

Selain itu, undang-undang dapat mengintegrasikan program pendidikan atau pelatihan bagi orang tua pasca perceraian yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi mereka. Program-program seperti ini bisa sangat bermanfaat dalam membantu para ayah memahami cara berkomunikasi dengan anak-anak mereka dalam konteks baru pasca perceraian. Implikasi hukum dari peningkatan komunikasi mencakup potensi pemenuhan tanggung jawab nafkah anak yang lebih baik. Dengan komunikasi yang lebih baik, ayah akan lebih memahami kebutuhan anak dan responsif terhadap perubahan dalam hidup mereka. Situasi ini tidak hanya memperkuat hubungan ayah-anak tetapi juga memastikan bahwa tanggung jawab nafkah anak dipenuhi dengan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan anak.

Kondisi Ekonomi Ibu yang Lebih Mapan

Dalam konteks hukum keluarga, semakin mapan peran ekonomi ibu pasca perceraian mendapat pertimbangan khusus, terutama mengenai tanggung jawab pemenuhan nafkah anak. Peraturan hukum keluarga saat ini mengakui pentingnya kontribusi kedua orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak tanpa membedakan peran berdasarkan gender. Peraturan ini mencerminkan perubahan paradigma dimana kontribusi ekonomi ibu tidak lagi dianggap sebagai hal sekunder.

Lebih lanjut, doktrin hukum yang ada telah menyesuaikan dengan pemahaman bahwa tanggung jawab pemenuhan nafkah anak tidak hanya berada di tangan ayah. Dalam konteks ini, semakin mapan peran ekonomi ibu menjadi faktor krusial dalam menentukan besaran atau proporsi nafkah anak yang harus dipenuhi oleh setiap orang tua. Situasi ini menandai pergeseran dari pandangan tradisional yang cenderung membebani ayah dengan tanggung jawab keuangan penuh.

Di sisi lain, penafsiran hukum mengenai pembagian tanggung jawab pemenuhan nafkah anak antara ayah dan ibu menjadi relevan ketika ayah menghadapi tantangan dalam memenuhi kewajibannya. Ketika seorang ayah menghadapi kesulitan keuangan, pengadilan sering kali dihadapkan pada tugas untuk menilai kembali pembagian tanggung jawab nafkah anak. Dalam proses ini, Pengadilan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk pendapatan dan kondisi ekonomi ibu. Jika sang ibu mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih mapan, undang-undang mungkin akan membebani tanggung jawab yang lebih besar kepada sang ibu untuk membiayai anak, yang mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan

This regulation mirrors the legal principle emphasizing child welfare protection as the primary priority, where both parents are expected to contribute according to their capabilities.

In interpreting the law, courts also take into account the dynamics of socio-economic changes. The contemporary socio-economic reality, where women often have equal or even more established economic roles than men, provides a context for courts to adjust their interpretation regarding the division of responsibility for child support. This condition leads to more inclusive and dynamic legal practices, where courts consider not only the child's needs but also the financial capacities and conditions of both parents in meeting these needs (Amadea et al., 2022).

Jurisprudence, as a collection of relevant court decisions, provides essential guidance in understanding how the law is applied in real cases concerning the responsibility for child support. Court decisions in previous cases often serve as references in determining how the responsibility for child support is divided between fathers and mothers, especially in situations where one party faces economic constraints. This jurisprudence reveals that courts tend to adopt a balanced approach, considering various aspects such as the economic conditions of both parents, the child's needs, and principles of fairness and child welfare.

In some cases, court decisions indicate a tendency to accommodate changes in the mother's economic condition post-divorce. For example, in situations where the mother has better financial stability than the father, the Court may decide to adjust the division of responsibility for child support. Such decisions affirm that the responsibility for child support should not be solely borne by the father but should adapt to the economic realities of both parents (Rimi, 2023). This approach reflects a more dynamic and adaptive legal understanding of changing socio-economic conditions.

Further, jurisprudence also shows special attention to the best interests of the child. In determining the responsibility for child support, courts do not merely look at the financial capability of the parents but also consider how this division of responsibility will affect the child's welfare and development. Court decisions are often directed to ensure that, despite changes in the family structure post-divorce, the child continues to receive adequate support from both parents. Thus, jurisprudence in the context of responsibility for child support reflects the legal effort to balance the child's

keseimbangan. Peraturan ini mencerminkan prinsip hukum yang menekankan perlindungan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama, dimana kedua orang tua diharapkan memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuannya.

Dalam menafsirkan undang-undang, pengadilan juga mempertimbangkan dinamika perubahan sosial ekonomi. Realitas sosio-ekonomi masa kini, dimana perempuan seringkali memiliki peran ekonomi yang setara atau bahkan lebih mapan dibandingkan laki-laki, memberikan konteks bagi pengadilan untuk menyesuaikan penafsiran mereka mengenai pembagian tanggung jawab nafkah anak. Kondisi ini mengarah pada praktik hukum yang lebih inklusif dan dinamis, di mana pengadilan tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan anak namun juga kemampuan keuangan dan kondisi kedua orang tua dalam memenuhi kebutuhan tersebut.

Yurisprudensi, sebagai kumpulan keputusan pengadilan yang relevan, memberikan panduan penting dalam memahami bagaimana hukum diterapkan dalam kasus nyata mengenai tanggung jawab nafkah anak. Putusan pengadilan pada kasus-kasus sebelumnya seringkali menjadi acuan dalam menentukan bagaimana pembagian tanggung jawab nafkah anak antara ayah dan ibu, terutama dalam situasi di mana salah satu pihak menghadapi kendala ekonomi. Yurisprudensi ini mengungkapkan bahwa pengadilan cenderung mengambil pendekatan yang seimbang, dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti kondisi ekonomi kedua orang tua, kebutuhan anak, serta prinsip keadilan dan kesejahteraan anak.

Dalam beberapa kasus, putusan pengadilan menunjukkan kecenderungan untuk mengakomodasi perubahan kondisi ekonomi ibu pasca perceraian. Misalnya, dalam situasi di mana ibu memiliki stabilitas keuangan yang lebih baik dibandingkan ayah, Pengadilan dapat memutuskan untuk menyesuaikan pembagian tanggung jawab nafkah anak. Keputusan-keputusan tersebut nafkah bahwa tanggung jawab nafkah anak tidak boleh semata-mata ditanggung oleh ayah, namun harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi kedua orang tua. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman hukum yang lebih dinamis dan adaptif terhadap perubahan kondisi sosial ekonomi.

Lebih lanjut, yurisprudensi juga menunjukkan perhatian khusus pada kepentingan terbaik bagi anak. Dalam menentukan tanggung jawab nafkah anak, pengadilan tidak hanya melihat kemampuan finansial orang tua tetapi juga mempertimbangkan bagaimana pembagian tanggung jawab ini akan mempengaruhi kesejahteraan dan perkembangan anak. Keputusan pengadilan sering kali diarahkan untuk memastikan bahwa, meskipun terjadi perubahan dalam struktur keluarga pasca perceraian, anak tetap menerima dukungan yang memadai dari kedua orang tuanya. Dengan demikian, yurisprudensi dalam konteks tanggung jawab nafkah anak mencerminkan upaya

welfare, fairness to both parents and the economic realities they face.

A father's inability to be responsible for the fulfillment of child support has significant implications in the context of family law. The legal implications of this situation firstly affect the Court's assessment in establishing the responsibility for child support. In circumstances where a father cannot fully meet his obligations, the law requires adjustments to ensure the child's welfare is not compromised. This situation often leads to more flexible legal decisions, where courts may consider the mother's financial condition and other factors in determining the division of responsibility for child support.

Furthermore, this situation prompts an evolution in family law practices, where courts focus not only on the father's financial responsibility but also on the needs and rights of the child. In this regard, a father's inability to be responsible for the fulfillment of child support is not just considered a personal issue but also a legal matter requiring solutions that are fair and child-oriented (Salsabila et al., 2022). This change reflects the understanding that the financial condition of one parent should not compromise a child's welfare.

Finally, a father's inability to be responsible for the fulfillment of child support necessitates family law to adapt to changing socio-economic circumstances. This situation demands a more holistic and inclusive approach in family law, where regulations and policies must be able to accommodate various family configurations and financial conditions. The long-term implications of this situation may include the need for reforms in family law to address cases where fathers are unable to be responsible for the fulfillment of child support while ensuring that the rights and needs of the child remain a top priority.

CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS

Based on the results and discussions, it is concluded that the primary responsibility for child support and education costs post-divorce lies with the father. The father's failure to fulfill this responsibility results in serious consequences, both legally and socially. Factors influencing a father's inability or failure include deteriorating economic conditions post-divorce, limited communication between father and child, and situations where the mother is financially more stable and takes over the role of providing child support. This conclusion highlights the complexity of

hukum untuk menyeimbangkan kesejahteraan anak, keadilan terhadap kedua orang tua, dan realitas ekonomi yang mereka hadapi.

Ketidakmampuan seorang ayah untuk bertanggung jawab atas pemenuhan nafkah anak mempunyai implikasi yang signifikan dalam konteks hukum keluarga. Implikasi hukum dari situasi ini pertama-tama mempengaruhi penilaian Pengadilan dalam menetapkan tanggung jawab nafkah anak. Dalam keadaan dimana seorang ayah tidak dapat sepenuhnya memenuhi kewajibannya, undang-undang memerlukan penyesuaian untuk memastikan kesejahteraan anak tidak terganggu. Situasi ini sering kali menghasilkan keputusan hukum yang lebih fleksibel, di mana pengadilan dapat mempertimbangkan kondisi keuangan ibu dan faktor-faktor lain dalam menentukan pembagian tanggung jawab nafkah anak.

Lebih jauh lagi, situasi ini mendorong terjadinya evolusi dalam praktik hukum keluarga, di mana pengadilan tidak hanya berfokus pada tanggung jawab finansial ayah namun juga pada kebutuhan dan hak anak. Dalam kaitan ini, ketidakmampuan seorang ayah dalam bertanggungjawab terhadap pemenuhan nafkah anak bukan hanya sekedar persoalan pribadi, namun juga merupakan persoalan hukum yang memerlukan penyelesaian yang adil dan berorientasi pada anak. Perubahan ini mencerminkan pemahaman bahwa kondisi keuangan salah satu orang tua tidak boleh membahayakan kesejahteraan anak.

Terakhir, ketidakmampuan seorang ayah untuk bertanggung jawab atas pemenuhan nafkah anak mengharuskan hukum keluarga beradaptasi dengan perubahan keadaan sosial ekonomi. Situasi ini menuntut pendekatan hukum keluarga yang lebih holistik dan inklusif, dimana peraturan dan kebijakan harus mampu mengakomodasi berbagai konfigurasi keluarga dan kondisi keuangan. Implikasi jangka panjang dari situasi ini mungkin mencakup perlunya reformasi hukum keluarga untuk mengatasi kasus-kasus di mana ayah tidak mampu bertanggung jawab atas pemenuhan nafkah anak sambil memastikan bahwa hak dan kebutuhan anak tetap menjadi prioritas utama.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan disimpulkan bahwa tanggung jawab utama nafkah anak dan biaya pendidikan pasca perceraian ada pada ayah. Kegagalan ayah untuk memenuhi tanggung jawab ini mengakibatkan konsekuensi yang serius, baik secara hukum maupun sosial. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakmampuan atau kegagalan seorang ayah antara lain memburuknya kondisi ekonomi pasca perceraian, terbatasnya komunikasi antara ayah dan anak, dan situasi di mana ibu lebih stabil secara finansial dan mengambil alih peran memberikan nafkah anak. Kesimpulan ini menyoroti kompleksitas tanggung jawab dan tantangan yang

responsibilities and challenges faced by fathers post-divorce in fulfilling their obligations to their children.

Based on the above conclusion, it is recommended that relevant stakeholders develop policies and programs that support fathers post-divorce in meeting their responsibilities for child support and children's educational expenses. It is vital to provide fathers access to economic resources, training, and legal assistance to help them overcome financial difficulties post-divorce. Additionally, there should be facilitation of more effective communication between father and child, involving counseling or family mediation. In situations where the mother has better financial stability, stakeholders should consider a balance in the division of child support responsibilities, enabling both parents to contribute according to their capabilities. This approach will help minimize negative impacts on the child and acknowledge the changing socio-economic dynamics post-divorce.

dihadapi para ayah pasca perceraian dalam memenuhi kewajibannya terhadap anak.

Berdasarkan kesimpulan di atas, direkomendasikan agar pemangku kepentingan terkait mengembangkan kebijakan dan program yang mendukung ayah pasca perceraian dalam memenuhi tanggung jawab mereka atas nafkah anak dan biaya pendidikan anak. Memberikan akses terhadap sumber daya ekonomi, pelatihan, dan bantuan hukum kepada para ayah sangatlah penting untuk membantu mereka mengatasi kesulitan keuangan pasca perceraian. Selain itu, harus ada fasilitasi komunikasi yang lebih efektif antara ayah dan anak, yang melibatkan konseling atau mediasi keluarga. Dalam situasi dimana ibu memiliki stabilitas keuangan yang lebih baik, pemangku kepentingan harus mempertimbangkan keseimbangan dalam pembagian tanggung jawab nafkah anak, sehingga memungkinkan kedua orang tua untuk berkontribusi sesuai dengan kemampuan mereka. Pendekatan ini akan membantu meminimalkan dampak negatif terhadap anak dan memahami perubahan dinamika sosio-ekonomi pasca perceraian.

REFERENCES

- The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>
- Adebayo, A. A. (2020). Religions and Legal Regimes Function in the Protection of Children. *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)*, 5(2), 335-360. <https://doi.org/10.15294/jils.v5i2.38049>
- Ainiyah, Q., & Muslih, I. (2020). Dilema Hukum Keluarga di Indonesia (Studi Analisis Kasus Perceraian di Indonesia). *Jurnal Istiqro*, 6(1), 73-81. <https://doi.org/10.30739/istiqro.v6i1.560>
- Amadea, N., Nasution, F. U., & Putri, S. A. (2022). The Appointing of a Legal Guardian based on Audi et Alteram Partem Principle and Only One Guardian Principle. *SIGn Jurnal Hukum*, 4(1), 124-139. <https://doi.org/10.37276/sjh.v4i1.185>
- Becker, G. S. (1965). A Theory of the Allocation of Time. *The Economic Journal*, 75(299), 493-517. <https://doi.org/10.2307/2228949>
- Darmi, R. (2016). Implementasi Konvensi Hak Anak Terkait dengan Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Proses Hukum (Implementation of Children Rights Convention Related to Children Protection against the Law). *Jurnal Penelitian Hukum de Jure*, 16(4), 439-450. <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2016.V16.439-450>
- Darna, A. (2021). Perkembangan Hukum Islam di Indonesia: Konsep Fiqih Sosial dan Implementasinya dalam Hukum Keluarga. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 4(1), 90-107. <http://dx.doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.8780>
- Ghaisa, S. S. R. (2020). Komunikasi Interpersonal Antara Orangtua dan Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin). *Jurnal Mutakallimin: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(1), 28-25. <http://dx.doi.org/10.31602/jm.v3i1.3525>
- Gussevi, S., Novianty, I., & Supiana, P. (2023). Father's Obligations for Post-Divorce Children's Mortgage Rights. *Muttaqien: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 4(1), 29-46. <https://doi.org/10.52593/mtq.04.1.03%20>
- Hudafi, H. (2020). Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 6(2), 172-182. <http://dx.doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i2.3647>
- Jatmiko, B. D. W., Hidayah, N. P., & Echaib, S. (2022). Legal Status of Interfaith Marriage in Indonesia and Its Implications for Registration. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 2(3), 167-177. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v2i3.43>

- Khairuddin, K., Badri, B., & Auliyana, N. (2020). Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/MS.Aceh). *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 3(2), 164-189. <http://dx.doi.org/10.22373/ujhk.v3i2.7700>
- Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1974 on Marriage (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1974 Number 1, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3019). <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/742>
- Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 1989 on Religious Courts (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1989 Number 49, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3400). <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/597>
- Law of the Republic of Indonesia Number 3 of 2006 on Amendment to Law Number 7 of 1989 on Religious Courts (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2006 Number 22, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4611). <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/59>
- Law of the Republic of Indonesia Number 50 of 2009 on the Second Amendment to Law Number 7 of 1989 on Religious Courts (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2009 Number 159, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5078). <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/587>
- Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2019 on Amendment to Law Number 1 of 1974 on Marriage (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2019 Number 186, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6401). <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/1753>
- Mahmud, Y., Akili, R. H. S., Kadir, Y., & Moonti, R. M. (2019). *Restorative Justice* dalam Putusan Hakim Nomor: 31/Pid.Sus/2018/PN.Lbto Atas Kasus Persetubuhan terhadap Anak. *SIGn Jurnal Hukum*, 1(1), 52-69. <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.37>
- Mansari, M., & Moriyanti, M. (2019). Sensitivitas Hakim terhadap Perlindungan Nafkah Isteri Pasca Perceraian. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 5(1), 43-58. <http://dx.doi.org/10.22373/equality.v5i1.5377>
- Miralles, P., Godoy, C., & Hidalgo, M. D. (2023). Long-Term Emotional Consequences of Parental Alienation Exposure in Children of Divorced Parents: A Systematic Review. *Current Psychology*, 42, 12055-12069. <https://doi.org/10.1007/s12144-021-02537-2>
- Mubarak, R., Munawir, Z., & Munthe, R. (2016). Peranan Pengadilan Agama Kelas I Medan terhadap Pembatalan Perkawinan. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial*, 8(2), 190-200. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v8i2.5165>
- Novitasari, C. N., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Analisis Hukum Islam terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan (Analysis of Islamic Law on Factor of Marriage Divorce). *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 3(2), 322-341. <http://dx.doi.org/10.22373/sjkh.v3i2.4441>
- Nurfieni, A. (2022). Dinamika Regulasi Perlindungan Hak Konstitusional Anak Pasca Perceraian. *Jurnal Cita Hukum Indonesia*, 1(2), 73-86. <https://doi.org/10.57100/jchi.v1i2.15>
- Putri, E. A. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Perceraian Akibat Perselisihan Terus Menerus. *Jurnal Hukum Sasana*, 7(1), 163-181. <https://doi.org/10.31599/sasana.v7i1.618>
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Rahman, S., Qamar, N., & Kamran, M. (2020). Efektivitas Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Kasus Perkawinan Poligami. *SIGn Jurnal Hukum*, 1(2), 104-118. <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i2.60>
- Resmini, W., Sakban, A., & Resmayani, N. P. A. (2021). Utang Piutang setelah Terjadinya Perceraian. *Selaparang: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkelanjutan*, 5(1), 773-783. <https://doi.org/10.31764/jpmb.v5i1.6531>
- Rimi, A. M. (2023). The Position of Premarital Property and Joint Property after Divorce: A Study of Premarital Agreement. *SIGn Jurnal Hukum*, 4(2), 376-387. <https://doi.org/10.37276/sjh.v4i2.226>
- Salsabila, C. A., Sumarwoto, S., & Dewi, P. M. (2022). Tinjauan Hukum Islam terhadap Akibat Hukum Perceraian karena Ketidakmampuan Suami Menafkahi Istri. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 5(2), 170-180. <https://doi.org/10.30996/jhbbs.v5i2.6356>
- Sampara, S., & Husen, L. O. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Kretakupa Print.

- Sihabuddin, N. K., & Nahuway, J. (2022). Pola Komunikasi Interpersonal Orang Tua dan Anak pada Keluarga Broken Home. *Jurnal Ilmu Komunikasi Pattimura*, 1(2), 132-149. <https://doi.org/10.30598/JIKPvol1iss2pp132-149>
- Trisna, K. D. N. Y., Sudiatmaka, K., & Adnyani, N. K. S. (2022). Implementasi Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil terhadap Proses Perceraian pada Perkawinan Tidak Tercatat di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(3), 297-307. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.51907>
- Tsani, W. L., & Utama, A. D. W. (2022). Perceraian di Masa Pandemi Covid-19; Analisis terhadap Penyebab Meningkatnya Angka Perceraian di Semarang. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, 16(2), 249-269. <https://doi.org/10.24239/blc.v16i2.1167>
- United Nations General Assembly. (1989, 20 November). *Resolution Adopted by the General Assembly: 44/25. Convention on the Rights of the Child (A/RES/44/25)*. https://digitallibrary.un.org/record/80135/files/A_RES_44_25-EN.pdf?ln=en